



PERUBAHAN RENJA TAHUN 2025

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KOTA TARAKAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan Tahun 2025. Dokumen Perubahan Renja ini disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tarakan tahun 2025.

Dokumen renja ini memuat program, kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaan yang akan dijalankan oleh seluruh unit yang ada di lingkup Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan dalam rangka mewujudkan tujuan, sasaran, serta target yang telah ditetapkan di dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029, sebagai wujud konkrit peran serta Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan.

Ucapan terima kasih, tak lupa kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian dokumen Renja ini. Upaya koreksi konstruktif dan masukan-masukan dari semua pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan dokumen Renja di masa datang.

Tarakan, 3 Juli 2025

Kepala Dinas



H. AGUS SUTANTO, S.Sos., M.AP
NIP 196806041988031010

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Perencanaan Pembangunan nasional seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengharuskan setiap daerah untuk menyusun Dokumen Perencanaan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Paralel dengan penyusunan RKPD, setiap Organisasi Perangkat Daerah juga wajib menyusun Rencana Kerja (Renja). Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun dan disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) SKPD dan mengacu kepada RKPD.

Sebagai dokumen Perangkat Daerah, Renja mempunyai kedudukan strategis dalam menjembatani perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah meliputi:

- a. persiapan penyusunan Renja;

- b. penyajian rancangan awal Renja;
- c. pembahasan internal OPD rancangan Renja;
- d. penyusunan rancangan akhir Renja; dan
- e. penetapan Renja.

Sesuai dengan amanatnya Pemerintah Kota Tarakan telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) periode 20 tahunan, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026 untuk pembangunan 2 (dua) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk pembangunan tahunan sesuai tahapan dan tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode satu tahun yang disusun untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada. Secara umum, dokumen RKPD mempunyai nilai penting, antara lain: merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Tarakan; acuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja; landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam penyusunan RAPBD Kota Tarakan Tahun 2025; dan menjadi bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD untuk memastikan APBD telah disusun berpedoman pada RKPD.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan Tahun 2025, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Renja SKPD) untuk periode tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Daerah (RPD) Kota Tarakan Tahun 2025.

Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, maka disusunlah Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Industri dan Tenaga Kerja yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pengaduan dan peningkatan kapasitas; perencanaan tenaga kerja; pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja; penempatan tenaga kerja; hubungan industrial; perencanaan dan Pembangunan industri; pengendalian izin usaha industri; dan pengelolaan sistem informasi industri nasional.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan Tahun 2025, memerhatikan dan mengacu pada perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan;

15. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tarakan Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 07 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026;
18. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Unit Pelaksana Teknis Lembaga Latihan Kerja pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan;
19. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Tahun 2025-2026;
20. Peraturan Walikota Tarakan Nomor xx Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
21. Peraturan Walikota Tarakan Nomor 100.3.3.3/HK-I/ 40/ 2025 Tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 Pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan.

1.3 Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPTK) Tahun 2025 dimaksudkan untuk memberikan arah dan acuan dalam penentuan program dan kegiatan DPTK Kota Tarakan Tahun 2025 guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis DPTK secara berkesinambungan.

Tujuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja DPTK Tahun 2025 adalah:

- a. Menyediakan dokumen rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif dan lokasi kegiatan dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan DPTK Kota Tarakan Tahun 2025.

- b. Menyediakan sarana pengendalian program dan kegiatan serta subkegiatan tahun 2025 dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis DPTK Kota Tarakan secara sistematis.
- c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh DPTK Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang dan bagian atau unit, dan
- d. Sebagai pedoman dalam penentuan program dan kegiatan serta sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) DPTK Kota Tarakan Tahun Anggaran 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian Dokumen Perubahan Rencana Kerja DPTK Kota Tarakan Tahun 2025 terdiri atas lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan

Menguraikan Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta Sistematika Penulisan Rencana Kerja.

Bab II Hasil Evaluasi Renja DPTK Kota Tarakan Sampai Dengan Triwulan II tahun 2025

Memuat evaluasi pelaksanaan Renja s.d Triwulan II dan capaian Renstra DPTK Kota Tarakan, analisis kinerja pelayanan DPTK Kota Tarakan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi DPTK Kota Tarakan, review terhadap RKPD Tahun 2025 serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III Tujuan Dan Sasaran DPTK Kota Tarakan

Menguraikan telaahan terhadap kebijakan nasional, indikator kinerja, serta tujuan dan sasaran Renja DPTK Kota Tarakan Tahun 2025.

Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan DPTK Kota Tarakan

Menguraikan rencana kerja dan pendanaan DPTK Kota Tarakan Tahun 2025.

Bab V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DPTK DAN PENCAPAIAN RENSTRA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja s.d dengan triwulan II dan Pencapaian Renstra DPTK Kota Tarakan

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan tahun sebelumnya dan pencapaian kinerja Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan dimaksudkan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan. Kajian (review) dilakukan terhadap pelaksanaan renja tahun lalu (tahun n-1) dan perkiraan capaian tahun berjalan yang dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun 2025. Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja DPTK sampai dengan triwulan II Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini.

Pada awal Tahun 2025 DPTK Kota Tarakan menganggarkan Belanja Operasi sebesar total Rp. 6.463.674.289,00 yang terbagi atas Belanja Pegawai sebesar Rp. 5.599.738.326,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 863.935.972,00. Belanja Modal dianggarkan sebesar total Rp. 374.374.680,00. Sampai dengan triwulan kedua, penyerapan anggaran DPA Murni DPTK tahun 2025 adalah sebesar Rp. 3.679.178.005,00 dengan rincian realisasi fisik sebesar 58,11% dan realisasi keuangan sebesar 51,06%.

Adapun rincian penyerapan anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 6 kegiatan dan 20 sub kegiatan mencapai 63,85% pada realisasi fisik dan 56,07% pada realisasi keuangan. Adapun rincian Penyerapan anggaran antara lain pada kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah sebesar Rp. 3.536.336.405,00, kegiatan Administrasi umum perangkat daerah sebesar Rp. 74.110.389,00, kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sebesar Rp.

47.625.711,00, dan kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan sebesar Rp. 4.028.500,00;

2. Program Perencanaan Tenaga Kerja dengan satu kegiatan dan satu sub kegiatan yaitu Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro dengan total anggaran sebesar Rp. 23.600.800,00 belum teralisasi hingga akhir periode triwulan kedua karena menunggu proses efisiensi yang sedang berlangsung;
3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja memiliki satu kegiatan yaitu pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi dengan 2 sub kegiatan antara lain proses pelaksanaan Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi dan pengadaan sarana pelatihan kerja kabupaten/kota dengan total anggaran sebesar Rp. 194.792.340,00 belum terdapat penyerapan anggaran hingga akhir periode triwulan kedua karena proses kegiatan di jadwal pada triwulan ketiga;
4. Program Penempatan Tenaga Kerja dengan total anggaran sebesar Rp. 137.456.980,00 memiliki 3 kegiatan dan 8 sub kegiatan. Adapun realisasi kegiatan sampai dengan akhir periode akhir tri wulan kedua antara lain kegiatan pelayanan antar kerja di daerah kabupaten/kota dan kegiatan perlindungan PMI (pra dan purna penempatan) di daerah kabupaten/kota realisasi masih 0% karena masih menunggu proses efisiensi yang sedang berlangsung, sedangkan pada kegiatan pengelolaan informasi pasar kerja terdapat realisasi fisik dan keuangan sebesar 5,75% atau sebesar Rp. 1.850.000,00.
5. Pada Program Hubungan Industrial terdapat 2 kegiatan dan 4 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 88.678.800,00 masih belum melaksanakan kegiatan atau realisasi 0% karena menunggu proses efisiensi yang masih berlangsung;
6. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri memiliki 3 kegiatan dan 3 sub kegiatan memiliki rincian realisasi antara lain pada kegiatan penyusunan dan evaluasi rencana Pembangunan industri yang

memiliki 3 sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 213.980.840,00 telah terealisasi sebesar Rp. 14.527.000,00 atau sebesar 7,03% realisasi fisik dan 6,79%;

7. Program Pengendalian izin usaha industri dengan 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan masih belum terlaksana atau 0% karena menunggu proses efisiensi yang sedang berlangsung;
8. Program pengelolaan sistem informasi industri nasional memiliki 1 kegiatan berupa penyediaan informasi industri untuk informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI kewenangan Kabupaten/Kota memiliki 2 sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 11.982.380,00 belum melaksanakan kegiatan karena masih menunggu proses efisiensi yang masih berlangsung.

**Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja s.d Triwulan II dan Pencapaian Renstra
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan**

N o	Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja & Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan (2025)				Realisasi Capaian Kinerja & Anggaran RKPD Tahun yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Tahun yang dievaluasi (%)		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
										I		II						
								K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
1	3					4	5	8		9		10		13 = (9 + 10 + 11 + 12)		14 = (13 / 8 * 100) %		17
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA												
	2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA			35,000,000					-				Dinas Perindustri an dan Tenaga Kerja
	2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)			35,000,000					-		0.00%	0.00 %	
1	2	07	02	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	25 Orang	35,000,000	0	-	0	-	0 Orang	-	0.00%	0.00 %	
																0.00%	0.00 %	
																SR	SR	
	2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA			199,412,350					-				Dinas Perindustri an dan Tenaga Kerja
	2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi			199,412,350					-		0.00%	0.00 %	

2	2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	16 Orang	51,021,570	0	-	0	-	0 Orang	-	0.00%	0.00%	
3	2	07	03	2.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	20 Unit	148,390,780	0	-	0	-	0 Unit	-	0.00%	0.00%	
																0.00%	0.00%	
																SR	SR	
	2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA			174,361,070						-			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota			109,366,590						-	0.00%	0.00%	
4	2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	300 Orang	19,981,160	0	-	0	-	0 Orang	-	0.00%	0.00%	
5	2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	15 Orang	29,974,600	0	-	0	-	0 Orang	-	0.00%	0.00%	
6	2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	40 Orang	59,410,830	0	-	0	-	0 Orang	-	0.00%	0.00%	
	2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja			49,998,100						-	0.00%	0.00%	
7	2	07	04	2.03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	5,000,000	0	-	0	-	0 Dokumen	-	0.00%	0.00%	
8	2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1000 Orang	5,000,000	0	-	0	-	0 Orang	-	0.00%	0.00%	

9	2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	250 Orang	39,998,100	0	-	0	-	0 Orang	-	0.00%	0.00%	
	2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota			14,996,380					-		0.00%	0.00%	
10	2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	3 Orang	9,999,920	0	-	0	-	0 Orang	-	0.00%	0.00%	
11	2	07	04	2.04	0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	3 Orang	4,996,460	0	-	0	-	0 Orang	-	0.00%	0.00%	
																0.00%	0.00%	
																SR	SR	
	2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL			109,799,860					-				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			7,159,660					-		0.00%	0.00%	
12	2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	20 Perusahaan	7,159,660	0	-	0	-	0 Perusahaan	-	0.00%	0.00%	
	2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan			102,640,200					-		0.00%	0.00%	

						Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota												
13	2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	6 Perkara	34,922,640	0	-	0	-	0 Perkara	-	0.00%	0.00%	
14	2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	4 Perkara	2,040,000	0	-	0	-	0 Perkara	-	0.00%	0.00%	
15	2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	31 Asosiasi dan Serikat Pekerja	11,054,560	0	-	0	-	0 Asosiasi dan Serikat Pekerja	-	0.00%	0.00%	
16	2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	2 Lembaga	54,623,000	0	-	0	-	0 Lembaga	-	0.00%	0.00%	
																0.00%	0.00%	
																SR	SR	
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN												
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN												
	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI			273,232,010					-				Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

	3	31	0 2	2.0 1		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota			273,232,010						-	0.00%	0.00 %	
1 7	3	31	0 2	2.0 1	000 1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	12,019,400	0	-	0	-	0 Dokumen	-	0.00%	0.00 %	
1 8	3	31	0 2	2.0 1	000 3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	4 Dokumen	70,000,000	0	-	0	-	0 Dokumen	-	0.00%	0.00 %	
1 9	3	31	0 2	2.0 1	000 5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4 Dokumen	191,212,610	0	-	0	-	0 Dokumen	-	0.00%	0.00 %	
															0.00%	0.00 %		
															SR	SR		
	3	31	0 3			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI			5,998,660						-			Dinas Perindustri an dan Tenaga Kerja
	3	31	0 3	2.0 1		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			5,998,660						-	0.00%	0.00 %	
2 0	3	31	0 3	2.0 1	000 3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota	4 Dokumen	3,998,660	0	-	0	-	0 Dokumen	-	0.00%	0.00 %	

							sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat											
2 1	3	31	0 3	2.0 1	000 4	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	2 Dokumen	2,000,000	0	-	0	-	0 Dokumen	-	0.00%	0.00 %	
																0.00%	0.00 %	
																SR	SR	
	3	31	0 4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL			21,851,770						-			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	3	31	0 4	2.0 1		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI			21,851,770						-	0.00%	0.00 %	

						dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota												
2 2	3	31	0 4	2.0 1	000 2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	4 Dokumen	19,999,770	0	-	0	-	0 Dokumen	-	0.00%	0.00 %	
2 3	3	31	0 4	2.0 1	000 3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	2 Dokumen	1,852,000	0	-	0	-	0 Dokumen	-	0.00%	0.00 %	
																0.00%	0.00 %	
																SR	SR	
	X					NON URUSAN												
	X	XX				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX												
	X	XX	0 1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			7,848,981,458						3,224,665,105			Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
	X	XX	0 1	2.0 1		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			9,000,000						-	0.00%	0.00 %	
2 4	X	XX	0 1	2.0 1	000 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	2,000,000	0	-	0	-	0 Laporan	-	0.00%	0.00 %	

25	X	XX	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	2,000,000	0	-	0	-	0 Laporan	-	0.00%	0.00%	
26	X	XX	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	5,000,000	0	-	0	-	0 Dokumen	-	0.00%	0.00%	
	X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			6,348,294,329						3,175,534,294	66.67%	40.88%	
27	X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	574 Orang/bulan	6,278,928,329	152	1,527,990,615	152	1,625,672,179	152 Orang/bulan	3,153,662,794	100.00%	50.23%	
28	X	XX	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	69,366,000	2	5,961,000	2	15,910,500	4 Dokumen	21,871,500	33.33%	31.53%	
	X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			165,810,990						-	0.00%	0.00%	
29	X	XX	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	19,999,320	0	-	0	-	0 Paket	-	0.00%	0.00%	
30	X	XX	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	49,911,940	0	-	0	-	0 Paket	-	0.00%	0.00%	
31	X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	74 Paket	49,999,160	0	-	0	-	0 Paket	-	0.00%	0.00%	
32	X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	14,999,770	0	-	0	-	0 Paket	-	0.00%	0.00%	
33	X	XX	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	6,000,000	0	-	0	-	0 Laporan	-	0.00%	0.00%	
34	X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	24,900,800	0	-	0	-	0 Laporan	-	0.00%	0.00%	
	X	XX	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			86,729,150						-	0.00%	0.00%	

35	X	XX	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	29 Unit	32,671,470	0	-	0	-	0 Unit	-	0.00%	0.00%	
36	X	XX	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	54,057,680	0	-	0	-	0 Unit	-	0.00%	0.00%	
	X	XX	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			171,360,000						45,625,711	57.78%	22.04%	
37	X	XX	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2,000,000	0	-	1	-	1 Laporan	-	100.00%	0.00%	
38	X	XX	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	165,560,000	1	28,540,086	1	15,585,625	2 Laporan	44,125,711	40.00%	26.65%	
39	X	XX	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3,800,000	0	-	1	1,500,000	1 Laporan	1,500,000	33.33%	39.47%	
	X	XX	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1,067,786,989						3,505,100	12.50%	14.24%	
40	X	XX	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	5,493,765	0	-	6	3,006,800	6 Unit	3,006,800	50.00%	54.73%	
41	X	XX	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	22,463,224	0	-	0	498,300	0 Unit	498,300	0.00%	2.22%	
42	X	XX	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1,000,000,000	0	-	0	-	0 Unit	-	0.00%	0.00%	
43	X	XX	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	62 Unit	39,830,000	0	-	0	-	0 Unit	-	0.00%	0.00%	

						Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi										
															22.82 %	12.86 %	
															SR	SR	
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 s/d PROGRAM)														3,224,665,105	2.85%	1.61 %	
															SR	SR	

Sesuai dengan Peraturan Walikota Tarakan Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, DPTK mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perindustrian dan di bidang ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Berdasarkan tabel 2.2 dibawah ini, Realisasi kinerja program dan kegiatan Renja Tahun 2025 sampai dengan triwulan II pada Renstra Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Program Perencanaan Tenaga Kerja pada kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro sebesar 0%.
- b. Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja pada kegiatan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi sebesar 43,16% dan pada kegiatan pengadaan sarana pelatihan kerja sebesar 41,17%.
- c. Program Penempatan Tenaga Kerja pada kegiatan Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 31,43%, Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan 49,59%, dan perluasan kesempatan kerja 44,39%.
- d. Program Penempatan Tenaga Kerja dengan kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja sub kegiatan Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online dan Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online sebesar 0% sedangkan sub kegiatan job fair/bursa kerja sebesar 42,23%.
- e. Program Penempatan Tenaga Kerja pada kegiatan Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebesar 49,25% dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan sebesar 37,86%.

- f. Program Hubungan Industrial Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan sebesar 0%.
- g. Program Hubungan Industrial Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota sub kegiatan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar 52,58%, sub kegiatan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 20,83%, sub kegiatan Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi sebesar 0%, dan sub kegiatan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota sebesar 40,02%.
- h. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota sub kegiatan Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota sebesar 48,18%, sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri sebesar 45,60 %, dan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat sebesar 48,55%.
- i. Program Pengendalian Izin Usaha Industri kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota dan sub kegiatan Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui

Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission sebesar 0%.

- j. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota sub kegiatan Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas sebesar 43,06% dan sub kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas sebesar 55,46%.
- k. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dan sub kegiatan Wali Data Pendukung Statistik Sektorial Daerah sebesar 0%.
- l. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar 70,90% dan sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebesar 52,57%.
- m. Administrasi Umum Perangkat Daerah sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar 39,23%, sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sebesar 49,78%, sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar 36,30%, sub kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan sebesar 33,84%, sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu sebesar 0%, sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar 42,98%.
- n. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sub kegiatan Pengadaan Mebel sebesar 49,41% dan sub kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebesar 49,99%.
- o. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar 50%, sub kegiatan Penyediaan

Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar 49,35%, dan sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar 23,68%.

- p. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar 63,35%, sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar 7,10%, sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar 10,14%, dan sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebesar 27,60%.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DPTK Kota Tarakan Tahun 2025

Analisis kinerja pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPTK) Kota Tarakan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2026, DPTK Kota Tarakan memiliki 4 (empat) indikator kinerja utama (IKU) dan 9 (sembilan) Indikator Kinerja Kunci (IKK). Pada Perubahan Renja terdapat penyesuaian menjadi 5 (lima) IKU dan 6 (enam) IKK dengan hasil analisis pencapaian kinerja pelayanan DPTK Kota Tarakan, sebagaimana tabel 2.2 dan table 2.3 dibawah ini.

**Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Kota Tarakan**

No	Indikator	Satuan	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan Analisis
					2025	2026	2024	2025	
-1	-2		-3	-4	-5	-6	-7	-8	-10
1	Indeks daya saing IKM yang difasilitasi	Indeks			11,60	11,80	11,40	11,60	
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen			66,50	66,74	66,14	66,50	
3	Persentase hubungan industrial yang harmonis	Persen			70,00	70,00	70,00	70,00	
4	Nilai SAKIP	Nilai			72,96	72,96	73,67	74,38	Proyeksi jauh melampaui target → perhitungan target dengan updating data baru
5	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen		✓	5,76	6,48	4,83	5,1	
6	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	Persen		✓	1,4	1,5	1,39	1,39	
	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah	Persen		✓	26,44	26,66	26,2	26,2	

	Kabupaten/kota								
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen		✓	51,43	51,44	51,42	51,43	
	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen		✓	95	100	92,3	94	
	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Persen		✓	36,93	36,94	36,92	36,92	

Pada Tabel 2.3 dibawah ini dapat dilihat Perubahan Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan pada tahun 2025. Terjadi perubahan pada indikator yang digunakan. Indikator nomor 1 (satu) terkait Tingkat pengangguran terbuka yang masih tinggi sehingga proyeksi sampai dengan akhir tahun 2025 sebesar 4,9% sedikit mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 5,11%. Pada indikator kedua yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja terjadi peningkatan yang sangat baik sebesar 0,91 poin persentase dari 2024 ke 2025 dan mencapai target tepat 100%, hal ini menunjukkan meningkatnya penyerapan tenaga kerja di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Indikator ketiga merupakan sektor industri yaitu rasio tenaga kerja sektor IKM dengan peningkatan dari 15,22% ke 15,29%. Hal ini Menunjukkan pertumbuhan positif sektor Industri Kecil Menengah dan kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja. Indikator keempat adalah indeks kepuasan masyarakat dengan target sebesar 70. Indikator ini merupakan poin baru bagi DPTK pada tahun 2025 terkait kualitas layanan yang ada di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan dengan tujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat atas kinerja yang dilakukan oleh DPTK. Indikator nomor 5 (lima) terkait nilai/predikat SAKIP mengalami perubahan karena pada awal tahun ditetapkan target 72,96 capaian telah terlampaui pada tahun 2024 yaitu 73,67 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target menjadi 74,38 karena capaian kinerja menunjukkan terjadi peningkatan dalam sistem akuntabilitas dan pelaporan kinerja DPTK.

Pada indikator keenam yaitu persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja layak Belum mencapai target (88,5% dari target). Terdapat Gap sebesar 0,66%

yang menunjukkan perlunya intensifikasi program pembinaan perusahaan dalam penerapan PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah, dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Indikator ketujuh adalah persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi yang mengalami stagnasi pada level 1,39% dan belum mencapai target 1,4% (99,3% dari target) sehingga perlu peningkatan pada program sertifikasi kompetensi tenaga kerja. Persentase penempatan tenaga kerja menjadi indikator kedelapan juga mengalami stagnasi di 26,2% dan belum mencapai target (99,1% dari target). Pelayanan antar kerja dalam dan luar negeri perlu ditingkatkan.

Pada indikator kesembilan mengalami pencapaian target dengan peningkatan dari 51,42% ke 51,43%. Menunjukkan efektivitas program peningkatan produktivitas tenaga kerja. Indikator kesepuluh terkait persentase kegiatan mengacu rencana tenaga kerja belum mencapai target, meskipun ada peningkatan dari 92,3% ke 94% hal ini dianggap masih perlu penguatan perencanaan dan implementasi program ketenagakerjaan. Indikator kesebelas adalah ketersediaan informasi industri yang hampir mencapai target (99,97% dari target) namun stagnan di 36,92%. Hal ini menunjukkan bahwa sistem informasi industri perlu penguatan untuk mencapai target lengkap, akurat, dan terkini.

Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan menunjukkan pencapaian yang baik dengan 6 dari 11 indikator mencapai target 100%. Indikator utama seperti TPT dan TPAK menunjukkan tren positif. Fokus perbaikan diperlukan pada aspek tata kelola kerja perusahaan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja untuk mencapai kinerja yang lebih komprehensif.

Tabel 2.3 Perubahan Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan

No	Indikator	Satuan	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian	Proyeksi	Catatan Analisis
					2025	2026	2024	2025	
-1	-2		-3	-4	-5	-6	-7	-8	-10
1	Tingkat pengangguran terbuka (TPT)	Perse n			4,9	4,69	5,11	4,9	Tingkat pengangguran terbuka masih tinggi
2	Tingkat Partisipasi	Perse n			64,55	64,74	63,64	64,55	Meningkatnya persentase tenaga kerja

	Angkatan Kerja (TPAK)								yang terserap pada DUDI
3	Rasio tenaga kerja sektor IKM	Angka			15,29	15,36	15,22	15,29	Rasio pertumbuhan sentra industri
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks			70	70,01	n/a	70	Sesuai target, tapi tidak menunjukkan peningkatan kualitas pelayanan.
5	Nilai/Predikat SAKIP	Nilai			74,38	75,09	73,67	74,38	Awal tahun ditetapkan target 72,96 capaian telah terlampaui pada tahun 2024 yaitu 73,67 sehingga perlu dilakukan penyesuaian target menjadi 74,38. Menunjukkan terjadi peningkatan dalam sistem akuntabilitas dan pelaporan kinerja.
6	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	Persen		✓	5,76	6,48	4,83	5,1	
7	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	Persen		✓	1,4	1,5	1,39	1,39	
8	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	Persen		✓	26,44	26,66	26,2	26,2	

9	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Persen		✓	51,4 3	51,4 4	51,42	51,43	
10	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen		✓	95	100	92,3	94	
11	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	Persen		✓	36,9 3	36,9 4	36,92	36,92	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan

Penentuan isu-isu strategis mutlak menjadi bagian dalam suatu proses perencanaan. Suatu kondisi/ kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah atau sebaliknya, jika dikelola dengan baik akan menjadi peluang guna meningkatkan layanan kepada masyarakat dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat.

Keberhasilan mengidentifikasi isu-isu strategis dengan tepat pada gilirannya akan membuat perencanaan disusun menjadi tepat sasaran, efektif, dapat diterima oleh pihak-pihak terkait, serta dapat dipertanggungjawabkan. Isu strategis diidentifikasi dari hasil analisis dan penelaahan terhadap berbagai sumber, antara lain:

1. Permasalahan pelayanan,
2. Sasaran, strategi, kebijakan, dan dinamika pembangunan nasional dan daerah (provinsi dan kota),
3. Rencana Tata Ruang Wilayah, dan
4. Isu Pembangunan Berkelanjutan.

Berdasarkan analisis dan penelaahan yang telah diuraikan di atas, maka dirumuskan isu strategis Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan untuk periode tiga tahun mendatang antara lain:

1. Optimalisasi pembinaan dan fasilitasi pengembangan usaha bagi IKM.
2. Peningkatan Daya saing IKM.
3. Peningkatan sarana dan prasarana industri.
4. Optimalisasi penempatan pencari kerja yang mendaftar.
5. Optimalisasi informasi ketenagakerjaan
6. Peningkatan kepatuhan ketenagakerjaan.
7. Peningkatan tata kelola administrasi, keuangan, dan aset.
8. Peningkatan Disiplin aparatur

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan Rancangan awal RKPD serta memperhatikan sasaran dan prioritas pembangunan, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Perangkat Daerah, maka analisis kebutuhan Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan Tahun 2025 pada Rancangan Awal (Ranwal) Renja tahun 2025 berdasarkan Renstra tahun 2025-2026 dianggarkan sebesar Rp 7.407.095.374,- dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota dengan alokasi anggaran Rp 5.783.033.448,- yang diperuntukkan 5 kegiatan dan 19 sub kegiatan;
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja dengan alokasi anggaran Rp 34.843.200,- yang diperuntukkan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan;
3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja dengan alokasi anggaran Rp 195.516.840,- yang diperuntukkan 1 kegiatan dan 2 sub kegiatan;
4. Program Penempatan Tenaga Kerja dengan alokasi anggaran Rp. 195.899.200,- yang diperuntukkan 3 kegiatan dan 9 sub kegiatan;
5. Program Hubungan Industrial dengan alokasi anggaran Rp. 110.008.120,- yang diperuntukkan 2 kegiatan dan 5 sub kegiatan;

6. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri dengan alokasi anggaran Rp. 274.508.340,- yang diperuntukkan 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan;
7. Program Pengendalian Izin Usaha Industri dengan alokasi anggaran Rp. 3.974.800,- yang diperuntukkan 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan;
8. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional dengan alokasi anggaran Rp. 24.499.900,- yang diperuntukkan 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan.

Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD, APBD dan RKPD Perubahan Perangkat Daerah dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut.

.

Tabel 2.4 Review Terhadap RKPD tahun 2025 Kota Tarakan

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan					Perangkat Daerah Penanggung Jawab
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025	
2					3	4	8	9	10	11	12	20
					Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja				8.668.637.178,00	7.366.992.274,00	7.605.063.836,10	
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				8.367.554.738,00	7.064.009.234,00	7.375.490.396,10	
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				8.367.554.738,00	7.064.009.234,00	7.375.490.396,10	
2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja yang tersusun	-	100 %	35.000.000,00	34.843.200,00	23.600.800,00	
2	07	02	2.01		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen Rencana Tenaga undefined	-	90 persen undefined undefined	35.000.000,00	34.843.200,00	34.843.200,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2	07	02	2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro							
						Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	25 Orang	25 Orang	35.000.000,00	34.843.200,00	23.600.800,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang kompeten	-	95 %	199.412.350,00	195.516.840,00	194.792.340,00	
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase peserta yang mendapatkan sertifikat pelatihan	-	95 persen	199.412.350,00	195.516.840,00	195.516.840,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi							

						Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	16 Orang	16 Orang	51.021.570,00	47.284.840,00	47.284.840,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2	07	03	2.01	0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota							
						Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	5 Unit	20 Unit	148.390.780,00	148.232.000,00	147.507.500,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang terserap	-	24.50 %	174.361.070,00	175.267.000,00	137.456.980,00	
2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kerja yg difasilitasi	-	100 persen	109.366.590,00	109.946.730,00	109.946.730,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2	07	04	2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja							
						Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	300 Orang	300 Orang	19.981.160,00	20.632.200,00	15.954.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan							
						Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	15 Orang	15 Orang	29.974.600,00	29.973.800,00	26.420.300,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2	07	04	2.01	0005	Perluasan Kesempatan Kerja							
						Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	40 Orang	40 Orang	59.410.830,00	59.340.730,00	51.378.330,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yg terserap/ditempatkan	-	1250 Pencari Kerja	49.998.100,00	50.333.450,00	50.333.450,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

2	07	04	2.03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online							
					Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.335.430,00	4.883.330,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
2	07	04	2.03	0002	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online							
					Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1000 Orang	1000 Orang	5.000.000,00	4.999.700,00	4.379.300,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja							
					Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	250 Orang	250 Orang	39.998.100,00	39.998.320,00	22.888.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	-	100 persen	14.996.380,00	14.986.820,00	14.986.820,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2	07	04	2.04	0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)							
					Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	3 Orang	3 Orang	9.999.920,00	9.999.800,00	6.956.700,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
2	07	04	2.04	0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan							
					Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	3 Orang	3 Orang	4.996.460,00	4.987.020,00	4.597.020,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA	
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan	-	80 %	109.799.860,00	110.008.120,00	88.678.800,00	

2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan yang menerapkan PP dan disahkan oleh dinas perindustrian dan tenaga kerja	-	50 persen	7.159.660,00	7.163.000,00	7.163.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2	07	05	2.01	0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan							
						Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	20 Perusahaan	20 Perusahaan	7.159.660,00	7.163.000,00	7.163.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus yang terselesaikan melalui pencegahan dan Perjanjian Bersama	-	80 persen	102.640.200,00	102.845.120,00	102.845.120,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah Perselisihan yang Dicegah	6 Perkara	6 Perkara	34.922.640,00	34.912.920,00	25.093.600,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	4 Perkara	4 Perkara	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2	07	05	2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi							

						Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	31 Asosiasi dan Serikat Pekerja	31 Asosiasi dan Serikat Pekerja	11.054.560,00	11.177.000,00	11.522.200,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota							
						Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	2 Lembaga	2 Lembaga	54.623.000,00	54.715.200,00	44.900.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan DPTK	-	70 Indeks	7.848.981.458,00	6.548.374.074,00	6.930.961.476,10	
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	1 Dokumen	9.000.000,00	8.999.800,00	8.999.800,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	1.999.800,00	1.850.800,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							
						Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	1.999.800,00	1.850.800,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah							

						Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	5.000.200,00	3.799.200,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Laporan Rekon Keuangan tahunan	-	2 Layanan 70 Indek	6.348.294.329,00	5.783.033.448,00	5.783.033.448,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	714 Orang/bulan	574 Orang/bulan	6.278.928.329,00	5.716.427.448,00	5.766.289.580,10	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN							
						Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	12 Dokumen	69.366.000,00	66.606.000,00	66.606.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	-	100 persen	165.810.990,00	165.954.646,00	165.954.646,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	19.999.320,00	20.113.106,00	20.113.106,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

2	07	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	49.911.940,00	49.875.120,00	49.875.120,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	108 Paket	74 Paket	49.999.160,00	49.997.030,00	49.997.030,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan							
						Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket	9 Paket	14.999.770,00	14.999.390,00	13.598.390,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu							
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	5.100.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	6 Laporan	24.900.800,00	24.970.000,00	24.970.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terinput dalam aplikasi SIMDA Barang	-	100 persen	86.729.150,00	87.451.700,00	87.451.700,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel							
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16 Unit	29 Unit	32.671.470,00	32.285.700,00	32.285.700,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							

						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	11 Unit	7 Unit	54.057.680,00	55.166.000,00	52.903.670,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang yang terselenggara	-	100 persen	171.360.000,00	171.360.000,00	171.360.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	5 Laporan	165.560.000,00	165.560.000,00	165.560.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3 Laporan	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang mendapatkan pemeliharaan	-	100 persen	1.067.786.989,00	331.574.480,00	331.574.480,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	12 Unit	5.493.765,00	69.286.165,00	8.073.765,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							

					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	22.463.224,00	22.468.315,00	22.468.315,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	3 Unit	1.000.000.000,00	200.000.000,00	600.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2	07	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	59 Unit	62 Unit	39.830.000,00	39.820.000,00	39.820.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			301.082.440,00	302.983.040,00	229.573.440,00	
3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN			301.082.440,00	302.983.040,00	229.573.440,00	
3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan industri	-	17.91 %	273.232.010,00	274.508.340,00	213.980.840,00
3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan perencanaan pembangunan	-	45 persen	273.232.010,00	274.508.340,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3	31	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						
					Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	1 Dokumen	12.019.400,00	12.042.000,00	5.673.400,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri						

						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	4 Dokumen	4 Dokumen	70.000.000,00	70.106.810,00	50.232.510,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat							
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4 Dokumen	4 Dokumen	191.212.610,00	192.359.530,00	158.074.930,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase izin usaha industri yang dipantau dan dianalisis	-	90 %	5.998.660,00	5.974.320,00	3.610.220,00	
3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase izin usaha industri yang dipantau dan dianalisis	-	90 persen	5.998.660,00	5.974.320,00	5.974.320,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3	31	03	2.01	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota							

						-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	4 Dokumen	4 Dokumen	3.998.660,00	3.974.800,00	2.622.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3	31	03	2.01	0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)							
						Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000,00	1.999.520,00	988.220,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data perusahaan industri yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan	-	85 %	21.851.770,00	22.500.380,00	11.982.380,00	
3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan industri yang memiliki akun SIINas dan menyampaikan laporan	-	3,5 persen	21.851.770,00	22.500.380,00	22.500.380,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3	31	04	2.01	0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas							
						Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	4 Dokumen	4 Dokumen	19.999.770,00	20.095.560,00	10.657.860,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3	31	04	2.01	0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas							
						Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	6 Dokumen	2 Dokumen	1.852.000,00	2.404.820,00	1.324.520,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
J U M L A H									8.668.637.178,00	7.366.992.274,00	7.605.063.836,10	

Dalam konteks dokumen perencanaan seperti Renja (Rencana Kerja) atau RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), istilah "*review*" merujuk pada proses evaluasi dan pemeriksaan ulang terhadap rancangan awal rencana pembangunan daerah yang diajukan oleh berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk DPTK.

Proses ini biasanya dilakukan oleh:

- Tim teknis perencanaan,
- Forum perencanaan,
- Atau melalui koordinasi antar-OPD.

Tujuannya adalah memastikan bahwa:

1. Semua usulan program/kegiatan sesuai dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah (dalam hal ini RPJMD Kota Tarakan).
2. Tidak ada tumpang tindih kegiatan antar-OPD.
3. Anggaran dialokasikan secara efisien dan proporsional.
4. Kegiatan bersifat realistis, terukur, dan relevan dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Berdasarkan rancangan awal program dan kegiatan yang ada, DPTK tidak hanya menyusun rencana internalnya sendiri, tetapi juga:

- Mengkaji ulang (*review*) rancangan awal RKPD,
- Memberikan masukan terhadap kebijakan dan alokasi anggaran,
- Menyesuaikan programnya agar sejalan dengan arah kebijakan nasional dan daerah.

Dengan adanya mekanisme *review*, maka DPTK mampu untuk:

1. Memberikan masukan kepada OPD lain yang terkait ketenagakerjaan dan industri.
2. Menyesuaikan kegiatannya agar tidak tumpang tindih dan saling mendukung.
3. Mendorong sinergi, misalnya dengan menyelaraskan data pasar kerja dengan program pengurangan kemiskinan dari OPD sosial.

Hal ini menunjukkan bahwa DPTK berperan sebagai mitra strategis, bukan hanya pelaksana teknis.

Partisipasi aktif DPTK dalam forum lintas-OPD sangat penting karena:

- Mencegah fragmentasi perencanaan (tiap OPD jalan sendiri).
- Meningkatkan efisiensi anggaran dan efektivitas program.
- Memastikan pendekatan terpadu dalam menyelesaikan isu strategis seperti pengangguran dan daya saing IKM.
- Memperkuat akuntabilitas dan transparansi perencanaan daerah.

Pada Tabel 2.5 dibawah ini, dapat dilihat review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2025 Kota Tarakan, DPTK tidak hanya fokus pada urusan internalnya, tetapi turut serta dalam proses perencanaan daerah secara holistik. Melalui evaluasi terhadap RKPD dan koordinasi dengan OPD lainnya. DPTK memastikan bahwa program ketenagakerjaan dan industri menjadi bagian integral dari pembangunan Kota Tarakan, bukan sekadar kegiatan sektoral yang terisolasi. Hal ini mencerminkan kedewasaan institusi dan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program/kegiatan usulan pemangku kepentingan sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 merupakan suatu hasil kajian yang diusulkan pemangku kepentingan sebagai bagian dari pendekatan perencanaan menggunakan sistem perencanaan bawah atas (*bottom-up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi, baik dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah. Untuk selanjutnya dilakukan penelaahan kesesuaian usulan dikaitkan dengan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah dan mengakomodasi usulan yang sesuai dengan program/kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah.

Berdasarkan hasil verifikasi data Usulan Masyarakat melalui Forum Musrenbang maupun Aspirasi Pokir DPRD di Tahun 2025 tidak terdapat usulan yang ditujukan kepada DPTK Kota Tarakan yang masuk dalam DPA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

Bab II mengungkapkan keteringgalan signifikan dalam pelaksanaan program DPTK hingga triwulan II 2025, dengan banyak kegiatan yang belum dimulai (realisasi 0%) dan minimnya data kinerja yang tersedia. Keterlambatan pelaksanaan Sebagian besar disebabkan oleh hambatan teknis seperti proses pengadaan dan penyesuaian perencanaan. Secara umum, kinerja pelaksanaan masih jauh dari optimal sehingga DPTK perlu melakukan percepatan pelaksanaan serta memperkuat sistem MONEV agar capaian kinerja bisa dipantau secara *real-time*.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA DPTK TAHUN 2025

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, selain didasarkan pada rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah, juga dilakukan penelaahan terhadap Kebijakan Nasional. Perencanaan pembangunan nasional pada tahun 2025 dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian arah dan target pembangunan nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. Arah dan kebijakan makro tahun 2024 masih mengusung tema “pemulihan ekonomi dan reformasi struktural”.

Tema tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam prioritas pembangunan nasional sebagai berikut.

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Mengacu pada urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh DPTK, yakni urusan perindustrian dan urusan ketenagakerjaan, maka dilakukan pula penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pusat pada sektor perindustrian dan sektor ketenagakerjaan. Dalam Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemenperin RI Tahun 2020-2024 disebutkan bahwa salah satu sasaran strategis yang ingin dicapai adalah penguatan kewirausahaan dan IKM, peningkatan nilai tambah IKM, pembangunan kerja sama kemitraan dengan industri besar, serta peningkatan proporsi penyaluran perbankan kepada IKM. Sasaran-sasaran strategis tersebut sejalan dengan kewenangan, tugas dan fungsi, serta dengan permasalahan pelayanan yang dihadapi oleh DPTK Kota Tarakan. Oleh sebab itu, dalam perumusan tujuan, sasaran, serta penetapan program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh DPTK Kota Tarakan perlu dipadukan dengan arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian RI.

Rencana Strategis Kementerian Ketenagakerjaan RI Tahun 2020- 2024 menyebutkan bahwa salah satu Sasaran Strategis Kementerian Tenaga Kerja adalah terwujudnya tenaga kerja yang kompeten, tangguh, lincah, produktif, dan berdaya saing dalam hubungan industrial yang kondusif untuk mendukung Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Indikator pencapaian sasaran tersebut antara lain: Persentase Tenaga Kerja yang ditingkatkan Kompetensinya dan ditempatkan, Kontribusi penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja terhadap penyediaan lapangan kerja.

Hal ini sejalan pula dengan tujuan strategis serta dapat pula disinergikan dengan program dan kegiatan yang dijalankan DPTK Kota Tarakan guna mendukung upaya dalam mengatasi masalah belum optimalnya penempatan pencari kerja yang mendaftar, masih kurangnya tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan, dan/atau pelatihan berbasis kompetensi.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja DPTK

Rencana Kerja DPTK Kota Tarakan Tahun 2025 merupakan pelaksanaan dari Renstra DPTK Kota Tarakan Tahun 2025-2026. Untuk menjamin keselarasan dan kesinambungan antar dokumen perencanaan, maka perumusan tujuan dan sasaran pada Renja DPTK Kota Tarakan Tahun 2025 mengacu pada tujuan dan sasaran dalam Renstra DPTK Kota Tarakan Tahun 2025-2026. Adapun tujuan Renja DPTK Kota Tarakan Tahun 2025 sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra DPTK Kota Tarakan Tahun 2025-2026, yaitu:

1. Meningkatnya pertumbuhan unit usaha dan daya saing IKM yang difasilitasi, dengan indikator persentase pertumbuhan unit usaha dan peningkatan daya saing industri kecil dan menengah (IKM) yang difasilitasi.
2. Menurunnya pengangguran, dengan indikator tingkat pengangguran terbuka dan persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan.
3. Meningkatnya Akuntabilitas DPTK dengan indikator Jumlah layanan penunjang perangkat daerah yang terpenuhi.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran, indikator sasaran, dan target kinerja sasaran Perubahan Rencana Kerja DPTK Kota Tarakan Tahun 2025 yang dapat dilihat pada tabel 3.1 dibawah ini.

Tabel 3.1: Sasaran dan Target Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET %
				2025
-1	-2	-3	-4	-5
Menurunnya pengangguran	Menurunnya pengangguran		Tingkat pengangguran terbuka	4.9
		1. Peningkatan partisipasi angkatan kerja	1.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	64.55

		2. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor IKM	2. Rasio tenaga kerja sektor IKM	15,29
		3. Meningkatnya Tata Kelola DPTK	3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70
			4. Nilai/Predikat SAKIP	74.38
	Meningkatnya daya saing industri kecil dan menengah (IKM)			
		Peningkatan daya saing IKM		

Tabel 3.1: Perubahan Sasaran dan Target Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET %
				2025
-1	-2	-3	-4	-5
Menurunnya pengangguran	Menurunnya pengangguran		Tingkat pengangguran terbuka	4.9
		1. Meningkatnya kesempatan kerja	1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	64.55
		2. Meningkatnya penyerapan tenaga kerja sektor IKM	2. Rasio tenaga kerja sektor IKM	15,29
		3. Meningkatnya Tata Kelola DPTK	3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	70
			4. Nilai/Predikat SAKIP	74.38

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan, yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan yang ditetapkan. Sedangkan kegiatan atau sub kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program yang terdiri atas sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik sumber daya manusia, barang modal, peralatan dan teknologi, maupun dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang dan/atau jasa.

Mengacu pada dokumen Renstra DPTK Kota Tarakan Tahun 2025-2026, terdapat tujuh program, 17 kegiatan, serta 44 sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Rencana Kerja Tahun 2023. Berikut adalah perincian program, kegiatan, dan sub kegiatan dimaksud.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja.
 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi
 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
 - Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota
 3. Program Penempatan Tenaga Kerja.
 - Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota

- Pelayanan antar Kerja
 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
 - Perluasan Kesempatan Kerja
 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
 - Job Fair/Bursa Kerja.
 - Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
 - Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
 - Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran
 - Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan
 - Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Hubungan Industrial.
- Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,
 - Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah
 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah
5. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri.
- Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
 - Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri
6. Program Pengendalian Izin Usaha Industri.
- Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
 - Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri
 - Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS)
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS).

7. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

- Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI,
- IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
- Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
- Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas.
- Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas.

Tabel 3.2 merupakan rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil rumusan rencana program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2025 dan prakiraan maju tahun 2026 Kota Tarakan dapat dilihat dibawah ini.

Tabel 3.2: Rumusan Rencana Program dan Kegiatan, Sub Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kota Tarakan

No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan		Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan		Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
										Target 2025	Pagu Indikatif (Rp)	Targ et	Pagu Indikatif (Rp)	
										Sesudah	RKPD Perubahan 2025			
1	2					3	4	5	6	7	8	9		
						Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja			7.605.063.836,10		8.274.637.178,00			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			7.375.490.396,10		7.973.554.738,00			
	2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA			7.375.490.396,10		7.973.554.738,00			
1	2	07	02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja yang tersusun	100 %	23.600.800,00		35.000.000,00			

	2	0	0	2.		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen Rencana Tenaga	90 persen	34.843.200,00		35.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	0	0	2.	00	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro						
							Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	25 Orang	23.600.800,00		35.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
2	2	0	0			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase pencari kerja yang kompeten	95 %	194.792.340,00		199.412.350,00	
	2	0	0	2.		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase peserta yang mendapatkan sertifikat pelatihan	95 persen	195.516.840,00		199.412.350,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	0	0	2.	00	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi						
							Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	16 Orang	47.284.840,00		51.021.570,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	0	0	2.	00	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota						
							Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan Kerja	20 Unit	147.507.500,00		148.390.780,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
3	2	0	0			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase tenaga kerja yang terserap	24.50 %	137.456.980,00		174.361.070,00	
	2	0	0	2.		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tenaga kerja yg difasilitasi	100 persen	109.946.730,00		109.366.590,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	0	0	2.	00	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja						
							Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	300 Orang	15.954.000,00		19.981.160,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	0	0	2.	00	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan						
							Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	15 Orang	26.420.300,00		29.974.600,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	0	0	2.	00	Perluasan Kesempatan Kerja						
							Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program	40 Orang	51.378.330,00		59.410.830,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN

							Perluasan Kesempatan Kerja					TENAGA KERJA
	2	0	0	2.		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah pencari kerja yg terserap/ditempatkan	1250 Pencari Kerja	50.333.450,00		49.998.100,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	0	0	2.	00	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online						
							Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen	4.883.330,00		5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	0	0	2.	00	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online						
							Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Online (Karir Hub)	1000 Orang	4.379.300,00		5.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	0	0	2.	00	Job Fair/Bursa Kerja						
							Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	250 Orang	22.888.000,00		39.998.100,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	0	0	2.		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota yang terfasilitasi	100 persen	14.986.820,00		14.996.380,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	0	0	2.	00	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)						
							Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	3 Orang	6.956.700,00		9.999.920,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	0	0	2.	00	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan						
							Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	3 Orang	4.597.020,00		4.996.460,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
4	2	0	0			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan	80 %	88.678.800,00		109.799.860,00	
	2	0	0	2.		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan	Persentase perusahaan yang menerapkan PP dan disahkan oleh dinas perindustrian dan tenaga kerja	50 persen	7.163.000,00		7.159.660,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

						yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
	2	0	0	2.	00	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan						
		7	5	01	01		Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	20 Perusahaan	7.163.000,00		7.159.660,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	0	0	2.		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kasus yang terselesaikan melalui pencegahan dan Perjanjian Bersama	80 persen	102.845.120,00		102.640.200,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	0	0	2.	00	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						
		7	5	02	01		Jumlah Perselisihan yang Dicegah	6 Perkara	25.093.600,00		34.922.640,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	0	0	2.	00	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						
		7	5	02	02		Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	4 Perkara	0,00		2.040.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	0	0	2.	00	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi						
		7	5	02	03		Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	31 Asosiasi dan Serikat Pekerja	11.522.200,00		11.054.560,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	0	0	2.	00	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota						
		7	5	02	04		Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	2 Lembaga	44.900.000,00		54.623.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
5	2	0	0			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan DPTK	70 Indeks	6.930.961.476,10		7.454.981.458,00	

	2	0	0	2.		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	8.999.800,00		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						
							Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1.850.800,00		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	0	0	2.	00	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1.850.800,00		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	0	0	2.	00	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						
							Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	3.799.200,00		0,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	0	0	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kualitas Layanan Kesekretariatan Laporan Rekon Keuangan tahunan	2 Layanan 70 Indeks	5.783.033.448,00		6.358.854.329,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	0	0	2.	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	574 Orang/bulan	5.766.289.580,10		6.278.928.329,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	0	0	2.	00	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						
							Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	66.606.000,00		79.926.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	0	0	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum yang tersedia	100 persen	165.954.646,00		165.810.990,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	0	0	2.	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang	1 Paket	20.113.106,00		19.999.320,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN

							an Bangunan Kantor yang Disediakan					TENAGA KERJA
	2	0	0	2.	00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						
		7	1	06	03		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	49.875.120,00		49.911.940,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	0	0	2.	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						
		7	1	06	04		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	74 Paket	49.997.030,00		49.999.160,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	0	0	2.	00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan						
		7	1	06	05		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket	13.598.390,00		14.999.770,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	0	0	2.	00	Fasilitasi Kunjungan Tamu						
		7	1	06	08		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	5.100.000,00		6.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	0	0	2.	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						
		7	1	06	09		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	6 Laporan	24.970.000,00		24.900.800,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	0	0	2.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terinput dalam aplikasi SIMDA Barang	100 persen	87.451.700,00		86.729.150,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	0	0	2.	00	Pengadaan Mebel						
		7	1	07	05		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	29 Unit	32.285.700,00		32.671.470,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	0	0	2.	00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						
		7	1	07	11		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	7 Unit	52.903.670,00		54.057.680,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

	2	0	0	2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase layanan jasa penunjang yang terselenggara	100 persen	171.360.000,00		175.800.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.000.000,00		2.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan	165.560.000,00		170.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan	3.800.000,00		3.800.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	0	0	2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang mendapatkan pemeliharaan	100 persen	331.574.480,00		667.786.989,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						
							Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	12 Unit	8.073.765,00		5.493.765,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	0	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						
							Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	22.468.315,00		22.463.224,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	0	0	2.	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						
							Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	600.000.000,00		600.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	2	0	0	2.	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						

						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	62 Unit	39.820.000,00		39.830.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		229.573.440,00		301.082.440,00	
	3	31				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN		229.573.440,00		301.082.440,00	
6	3	31	02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertumbuhan industri	17.91 %	213.980.840,00	273.232.010,00	
	3	31	02	2.01		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan perencanaan pembangunan	45 persen	274.508.340,00	273.232.010,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3	31	02	2.01	0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota					
						Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen	5.673.400,00		12.019.400,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3	31	02	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri					
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	4 Dokumen	50.232.510,00		70.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3	31	02	2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat					
						Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	4 Dokumen	158.074.930,00		191.212.610,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
7	3	31	03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase izin usaha industri yang dipantau dan dianalisis	90 %	3.610.220,00	5.998.660,00	
	3	31	03	2.01		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan	Persentase izin usaha industri yang dipantau dan dianalisis	90 persen	5.974.320,00	5.998.660,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

						Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota						
	3	3	0	2.	00	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota						
		1	3	01	03		-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	4 Dokumen	2.622.000,00		3.998.660,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3	3	0	2.	00	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)						
		1	3	01	04		Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah,	2 Dokumen	988.220,00		2.000.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

							selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat					
8	3	31	04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase data perusahaan industri yang valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan	85 %	11.982.380,00		21.851.770,00	
	3	31	04	2.01		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase perusahaan industri yang memiliki akun SIINas dan menyampaikan laporan	3,5 persen	22.500.380,00		21.851.770,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3	31	04	2.01	00 02	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas						
							Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	4 Dokumen	10.657.860,00		19.999.770,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
	3	31	04	2.01	00 03	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas						
							Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	2 Dokumen	1.324.520,00		1.852.000,00	DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

	J U M L A H	7.605.063.8 36,10	8.274.637.1 78,00	
--	-------------	----------------------	----------------------	--

Bab III berhasil menunjukkan keselarasan antara kebijakan nasional, RPJMD, dan rencana operasional DPTK. Sistem perencanaan telah menggunakan pendekatan berbasis kinerja dengan indikator yang terukur. Identifikasi tujuan dan sasaran dilakukan secara sistematis dan terintegrasi. Namun, terdapat beberapa catatan penting, antara lain:

1. Beberapa indikator masih bersifat administratif (jumlah dokumen/laporan), kurang menekankan pada dampak sosial-ekonomi langsung (misalnya peningkatan pendapatan IKM, penurunan pengangguran).
2. Capaian aktual masih rendah, meskipun target dan sasaran telah dirumuskan dengan baik — menunjukkan gap antara perencanaan dan implementasi.
3. Perlunya penajaman indikator *outcome* untuk memastikan bahwa kegiatan benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

Tujuan dan sasaran DPTK tahun 2025 menunjukkan upaya serius dalam menyusun perencanaan pembangunan yang terstruktur, legal, dan partisipatif. Namun, hasil evaluasi pelaksanaan hingga triwulan II 2025 mengungkapkan tantangan besar dalam eksekusi program, terutama dalam bentuk:

- Realisasi fisik dan keuangan yang sangat rendah (banyak kegiatan 0%),
- Keterlambatan pengadaan barang/jasa,
- Belum tersedianya data kinerja utama karena proses pengolahan masih berlangsung,
- Gap antara perencanaan strategis dan pelaksanaan operasional.

Di sisi positif, dokumen ini:

- Memiliki landasan hukum yang kuat,
- Menunjukkan keselarasan dengan RPJMD dan kebijakan nasional,

- Mengidentifikasi isu strategis secara komprehensif,
- Dan menggunakan sistem perencanaan berbasis kinerja.

Rekomendasi Strategis:

1. Percepatan Pelaksanaan Kegiatan: Lakukan percepatan pengadaan barang/jasa dan delegasi wewenang untuk mempercepat eksekusi.
2. Strengthen MONEV System: Bentuk tim MONEV internal yang aktif memantau capaian mingguan/triwulanan.
3. Revitalisasi Indikator Kinerja: Tambahkan indikator outcome seperti jumlah IKM yang naik kelas, tingkat penempatan kerja, atau indeks kepuasan pengguna layanan.
4. Sinkronisasi Anggaran dan Kinerja: Pastikan alokasi anggaran proporsional dengan beban kerja dan urgensi kegiatan.

Dengan perbaikan di area-area tersebut, DPTK Kota Tarakan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan dan benar-benar mewujudkan visi pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

BAB IV

Rencana Kerja dan Pendanaan

Untuk mencapai tujuan, sasaran, dan target kinerja yang telah ditetapkan di dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis DPTK Tahun 2025-2030 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2025, maka Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan menetapkan rencana kerja dalam bentuk program, kegiatan, dan sub kegiatan berikut pendanaannya.

Rumusan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah sebagaimana dirinci pada Tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1: Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Murni dan Perubahan DPTK Tahun 2025

KODE	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	APBD MURNI 2025 SEBELUM	APBD 2025 PENGGESERAN (Rp.)	APBD PERUBAHAN 2025
1	2	PERUBAHAN		4
19	JUMLAH ANG./REALISASI FISIK & KEU. KUMULATIF SKPD	7.366.992.274,00	7.205.064.286,10	7.605.064.286,10
2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.548.374.074,00	6.530.961.926,10	6.930.961.926,10
2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.783.033.448,00	5.832.896.030,10	5.832.896.030,10
2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.716.427.448,00	5.766.290.030,10	5.766.290.030,10
2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	66.606.000,00	66.606.000,00	66.606.000,00
2.07.01.01	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	8.999.800,00	7.500.800,00	7.500.800,00
2.07.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	1.999.800,00	1.850.800,00	1.850.800,00
2.07.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektor	5.000.200,00	3.799.200,00	3.799.200,00
2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.999.800,00	1.850.800,00	1.850.800,00
2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	165.954.646,00	163.653.646,00	163.653.646,00
2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.113.106,00	20.113.106,00	20.113.106,00
2.07.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49.875.120,00	49.875.120,00	49.875.120,00
2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	49.997.030,00	49.997.030,00	49.997.030,00
2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14.999.390,00	13.598.390,00	13.598.390,00

2.07.01.2.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu	6.000.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00
2.07.01.2.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.970.000,00	24.970.000,00	24.970.000,00
2.07.01.2.07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87.451.700,00	85.189.370,00	85.189.370,00
			Pengadaan Mebel	32.285.700,00	32.285.700,00	32.285.700,00
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	55.166.000,00	52.903.670,00	52.903.670,00
2.07.01.2.08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	171.360.000,00	171.360.000,00	171.360.000,00
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	165.560.000,00	165.560.000,00	165.560.000,00
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00
2.07.01.2.09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	331.574.480,00	270.362.080,00	670.362.080,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	69.286.165,00	8.073.765,00	8.073.765,00
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	22.468.315,00	22.468.315,00	22.468.315,00
2.07.01.2.09.0009			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000,00	200.000.000,00	600.000.000,00
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.820.000,00	39.820.000,00	39.820.000,00
2.07.02			PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	34.843.200,00	23.600.800,00	23.600.800,00
2.07.02.2.01			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	34.843.200,00	23.600.800,00	23.600.800,00
2.07.02.2.01.0001			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	34.843.200,00	23.600.800,00	23.600.800,00
2.07.03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	195.516.840,00	194.792.340,00	194.792.340,00
2.07.03.2.01			Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	195.516.840,00	194.792.340,00	194.792.340,00
2.07.03.2.01.0001			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	47.284.840,00	47.284.840,00	47.284.840,00
2.07.03.2.01.0003			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	148.232.000,00	147.507.500,00	147.507.500,00
2.07.04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	175.267.000,00	137.456.980,00	137.456.980,00
2.07.04.2.01			Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten	109.946.730,00	93.752.630,00	93.752.630,00
2.07.04.2.01.0003			Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	20.632.200,00	15.954.000,00	15.954.000,00
2.07.04.2.01.0004			Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	29.973.800,00	26.420.300,00	26.420.300,00
2.07.04.2.01.0005			Perluasan Kesempatan Kerja	59.340.730,00	51.378.330,00	51.378.330,00

2.07.04.2.03			Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	50.333.450,00	32.150.630,00	32.150.630,00
2.07.04.2.03.0003			Job Fair/Bursa Kerja	39.998.320,00	22.888.000,00	22.888.000,00
2.07.04.2.03.0001			Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	5.335.430,00	4.883.330,00	4.883.330,00
2.07.04.2.03.0002			Pelayanan dan Penyediaan informasi pasar kerja online	4.999.700,00	4.379.300,00	4.379.300,00
2.07.04.2.04			Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	14.986.820,00	11.553.720,00	11.553.720,00
			Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	9.999.800,00	6.956.700,00	6.956.700,00
			Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	4.987.020,00	4.597.020,00	4.597.020,00
2.07.05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	110.008.120,00	88.678.800,00	88.678.800,00
2.07.05.2.01			Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.163.000,00	7.163.000,00	7.163.000,00
2.07.05.2.01.0001			Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi perusahaan	7.163.000,00	7.163.000,00	7.163.000,00
2.07.05.2.02			Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	102.845.120,00	81.515.800,00	81.515.800,00
			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	34.912.920,00	25.093.600,00	25.093.600,00
			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.040.000,00	0,00	0,00
			Penyelenggaraan Verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi, dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh serta non afiliasi	11.177.000,00	11.522.200,00	11.522.200,00
			Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	54.715.200,00	44.900.000,00	44.900.000,00
3.31.02			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	302.983.040,00	213.980.840,00	213.980.840,00
3.31.02.2.01			Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	274.508.340,00	213.980.840,00	213.980.840,00
			Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	12.042.000,00	5.673.400,00	5.673.400,00
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	70.106.810,00	50.232.510,00	50.232.510,00
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	192.359.530,00	158.074.930,00	158.074.930,00
3.31.03			PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	5.974.320,00	3.610.220,00	3.610.220,00
3.31.03.2.01			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan	5.974.320,00	3.610.220,00	3.610.220,00

			Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota			
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	3.974.800,00	2.622.000,00	2.622.000,00
			Fasilitasi Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem SIINas	1.999.520,00	988.220,00	988.220,00
3.31.04			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	22.500.380,00	11.982.380,00	11.982.380,00
3.31.04.2.01			Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	22.500.380,00	11.982.380,00	11.982.380,00
			Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	20.095.560,00	10.657.860,00	10.657.860,00
			Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	2.404.820,00	1.324.520,00	1.324.520,00

Berdasarkan data dari table 4.1 diatas, dapat dianalisis bahwa Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (DPTK) Kota Tarakan sedang fokus pada penguatan sistem informasi industri melalui integrasi dengan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Salah satu sub kegiatan utama yang menjadi prioritas adalah 3.31.04.2.01.0002: Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas dengan alokasi anggaran perubahan sebesar Rp 16.708.020,00. Meskipun dalam rencana murni target output ditetapkan sebanyak 4 dokumen, realisasi hingga periode pelaporan baru mencapai 1 dokumen, atau setara dengan capaian fisik 25% dan keuangan 43,06%. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara progres fisik dan penyerapan anggaran, yang bisa disebabkan oleh keterlambatan pelaksanaan di awal tahun atau proses administratif yang belum sepenuhnya terealisasi.

Di samping itu, terdapat pula sub kegiatan 3.31.04.2.01.0003: Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dalam Penyampaian Data ke SIINas, yang telah berhasil mencapai 2 dari 2 dokumen yang ditargetkan, dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.720.000,00 dari total pagu Rp 4.904.000,00. Capaian keuangan sebesar 55,46% mengindikasikan bahwa

meskipun output secara kuantitatif telah terpenuhi, belum semua komponen biaya dapat direalisasikan, seperti perjalanan dinas atau honorarium yang mungkin dilaksanakan di triwulan berikutnya. Sub kegiatan ini sangat strategis untuk memastikan akurasi data industri di daerah, karena kepatuhan perusahaan dalam melaporkan data ke SIINas menjadi dasar bagi perencanaan pembangunan industri yang tepat sasaran.

Komposisi anggaran untuk kedua sub kegiatan tersebut didominasi oleh belanja operasional, seperti belanja alat tulis kantor (ATK), bahan cetak, makanan-minuman rapat, dan belanja perjalanan dinas. Misalnya, untuk kegiatan diseminasi data, terdapat penganggaran untuk kertas HVS, jilid dokumen, fotokopi, serta konsumsi rapat sosialisasi. Belanja perjalanan dinas juga cukup signifikan, menunjukkan bahwa aktivitas pemantauan dan publikasi data memerlukan mobilitas tim teknis ke lokasi perusahaan atau instansi terkait. Struktur belanja ini mencerminkan pendekatan langsung dan partisipatif dalam menjalankan fungsi pengawasan dan diseminasi informasi, meskipun tetap perlu dioptimalkan agar efisien dan tepat waktu.

Secara keseluruhan, Rencana Kerja dan Pendanaan DPTK Tahun 2025 menunjukkan komitmen DPTK Kota Tarakan dalam memperkuat tata kelola data industri sebagai fondasi perencanaan pembangunan sektor riil. Meskipun ada keterlambatan pada beberapa indikator kinerja, upaya untuk memperbarui data, memantau kepatuhan, dan menyebarkannya secara luas merupakan langkah maju menuju transparansi dan akuntabilitas. Namun, dibutuhkan percepatan pelaksanaan, pemantauan berkala, serta sinkronisasi antara penyerapan anggaran dan capaian fisik agar target Renstra dan RKPD dapat tercapai secara optimal. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan tidak hanya tersedia, tetapi juga dimanfaatkan dalam kebijakan nyata yang mendukung pertumbuhan industri dan penciptaan lapangan kerja di Kota Tarakan.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan Tahun 2025, merupakan perencanaan untuk satu tahun. Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Strategis DPTK Tahun 2025-2026 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tarakan Tahun 2025. Dokumen Renja ini diantaranya memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung Visi dan Misi Pemerintah Kota Tarakan. Dengan tersusunnya dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 ini, akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan Tahun 2025 dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang ada, serta berorientasi pada hasil yang ingin dicapai.

Guna menjaga kesinambungan perencanaan dan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Renja sebagai berikut:

1. Sekretariat, Bidang-Bidang, Unit, dan seluruh pegawai Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Tarakan secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangan masing-masing;
 - b. menjaga konsistensi antara RKPD, Renja, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2025.

Rencana Kerja DPTK Tahun 2025 ini mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan perencanaan dan pencapaian tujuan dan target kinerja yang diamanatkan melalui Dokumen RPJMD Tahun 2025-2026, yakni menurunnya pengangguran, meningkatnya pertumbuhan unit usaha dan daya saing IKM yang difasilitasi, dan meningkatnya akuntabilitas DPTK.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya sebagai tindak lanjut dari perencanaan dan upaya pencapaian target yang telah ditetapkan. Upaya-upaya tersebut, diantaranya:

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia DPTK untuk melaksanakan tugas perencanaan yang semakin kompleks, baik melalui pendidikan formal, bimbingan teknis, pelatihan, seminar, maupun kegiatan lain guna menunjang peningkatan kinerja pegawai.
2. Jumlah Pegawai di DPTK dirasakan masih kurang. Oleh karena itu, dibutuhkan penambahan pegawai agar rasio pekerjaan dan jumlah pegawai berimbang.
3. Menerapkan sistem reward dan punishment terhadap pegawai yang memiliki pencapaian kinerja baik guna peningkatan produktivitas pegawai.
4. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan OPD terkait agar pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat mencapai target yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.
5. Meningkatkan keterlibatan dan peran serta masyarakat mulai dari proses penyusunan perencanaan sampai dengan pelaksanaan dan evaluasi sehingga transparansi akan meningkat.

Tarakan, 3 Juli 2025
Kepala Dinas



H.AGUS SUTANTO, S.Sos., M.AP
NIP 196806041988031010